



IDN/ANTARA/REUTERS

## MENYEBERANGI SUNGAI DENGAN KABEL

Petugas pengadilan membawa lambang nasional saat menyeberangi sungai menggunakan kabel, untuk mengikuti sidang perceraian di desa Huilong, bagian Fengjie, kotamadya Chongqing, Tiongkok, Selasa lalu.

# Iran Minta Austria Lindungi Perundingan Nuklir dari Spionase

Kedua negara telah membuka penyelidikan terpisah atas tuduhan spionase di hotel tempat pembicaraan nuklir berlangsung.

**WINA (IM)** - Iran meminta Pemerintah Austria mengambil langkah cepat demi melindungi keamanan cyber saat perundingan nuklir berlangsung.

"Kami menuntut Kedutaan Luar Negeri Austria segera menyediakan semua langkah-langkah keamanan yang diperlukan saat pembicaraan, termasuk keamanan dunia maya dan tempat yang baik," kata Kedutaan Besar Iran di Austria, seperti dikutip, Al Arabiya, Selasa (16/6).

Kedutaan Besar di Iran juga meminta Kementerian Luar Negeri Austria dan Swiss, memberitahu mereka tentang hasil investigasi mata-mata yang telah dilakukan keduanya.

Wakil menteri dan para ahli dari kedua negara tersebut sedang membicarakan kesepakatan untuk membatasi program nuklir Teheran. Imbalannya, Iran akan dibebaskan dari sanksi embargo.

Teheran sendiri telah membantah tuduhan Barat bahwa mereka sedang mengembangkan teknologi nuklir. Iran juga menegaskan, kegiatan atomnya adalah

untuk tujuan energi dan damai.

Di Teheran, Presiden Iran Hassan Rouhani sebelumnya menyatakan kesepakatan nuklir bisa tertunda jika negara kekuatan dunia membawa masalah baru. Menurutnya, ia tak akan menerima inspeksi PBB yang dapat membahayakan rahasia negaranya.

"Iran benar-benar tak akan membiarkan rahasia nasional jatuh ke tangan asing melalui Protokol Tambahan atau cara lain," kata Rouhani dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

Pernyataan Rouhani mengacu pada aturan Badan Atom Internasional (IAEA) yang meminta akses lebih luas untuk inspeksi fasilitas militer Iran.

Selama ini kesepakatan nuklir antara Iran dan enam negara kekuatan dunia terkendala beberapa hal, termasuk masalah inspeksi situs militer Iran.

Amerika Serikat dan Prancis menyerukan Iran memberi akses luas pada situs militernya untuk diinspeksi.

Rouhani mengatakan, menyetujui kesepakatan Protokol

seperti yang dilakukan negara penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Tapi ia bersikeras tak mengizinkan tindakan lebih jauh.

"Masalah yang kami hadapi pada banyak isu adalah saat kami mencapai suatu kerangka dalam sebuah pertemuan, mitra negosiasi kami kembali membahas hal itu pada pertemuan berikutnya," kata Rouhani.

Menurut Rouhani, jika mitranya mengikuti kerangka kerja yang telah ditetapkan dan tak membawa masalah baru, ia percaya setiap masalah bisa diatasi.

Tapi. Lanjutnya, jika mitranya ingin mengambil langkah yang menyerempet bahaya, maka negosiasi akan memakan waktu lebih lama.

"Jika pihak lain menghormati hak-hak Iran dan kepentingan nasional kami dan tak menuntut berlebihan, saya percaya kesepakatan akan tercapai," ujarnya kepada wartawan.

IAEA selama ini memiliki akses namun terbatas ke situs yang berhubungan dengan nuklir Iran. Duta Besar AS untuk IAEA mengatakan pada akhir pekan kemarin, protokol tambahan untuk transparansi nuklir telah dituangkan dalam kesepakatan awal.

Iran telah setuju untuk memberikan akses kepada inspektur PBB ke sebagian situs militernya,

termasuk membiarkan mereka mengambil sampel lingkungan di sekitar pangkalan militer.

Tapi Iran berulang kali menyatakan, inspektur internasional tak akan diizinkan melakukan inspeksi lebih dalam ke situs militer mereka.

Amerika Serikat menegaskan April lalu bahwa sanksi terhadap Iran harus dihapus secara bertahap di bawah perjanjian nuklir Iran. Gedung Putih juga berupaya meyakinkan Kongres untuk menjaga kerangka kesepakatan yang telah dicapai bersama Iran pada April lalu.

Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan, tak ada ambiguitas mengenai permintaan AS terkait pengangkatan sanksi Iran.

Ia menambahkan AS tetap meminta sanksi diangkat secara bertahap sesuai kesepakatan akhir. Namun, menurutnya rincian masih harus dinegosiasikan. "Kami tak pernah pada posisi meminta semua sanksi dihapus di hari pertama."

Earnest menegaskan, AS ingin melihat komitmen Iran dalam mematuhi kesepakatan. Menurutnya, Iran akan lebih mungkin untuk mematuhi jika tahu sanksi bisa diterapkan kembali.

Ia menambahkan Gedung Putih juga sedang berupaya keras meyakinkan Kongres dan kritikus

## Obama Tak Akan Libatkan Pasukannya Perangi ISIS

**WASHINGTON (IM)** - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengatakan pasukan militernya yang dikirim ke Irak untuk melakukan operasi perlawanan terhadap Negara Islam Irak Suriah (ISIS), tidak akan terlibat dalam pertempuran.

Ditegaskannya bahwa pasukan Amerika Serikat hanya akan membantu pasukan Irak untuk menyusun strategi menghadapi ISIS.

"Tugas pasukan AS di Pangkalan Udara Taqaddum akan berkisar pada nasihat pada komandan Irak dan memastikan pasukannya tahu bagaimana mengintegrasikan kekuatan udara ke dalam rencana pertempuran," kata para pejabat pertahanan AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (16/6).

Pasukan AS juga sudah melakukan operasi di beberapa pangkalan lain di seluruh Irak untuk memberi pelatihan dan saran pada pasukan militer Irak.

Namun operasi di Taqaddum, tepatnya di dekat sungai Efrat di barat Baghdad, akan menempatkan pasukan AS sebagai inti serangan.

Sebelumnya, Obama resmi mengirim 450 penasihat, yang juga tergabung dalam pasukan militernya, untuk melatih militer Irak untuk melawan ISIS.

Hal ini juga disebabkan oleh pergerakan ISIS yang telah menguasai sebagian besar wilayah di negara itu dalam 18 bulan terakhir.

Amerika Serikat mengaku

telah menghabiskan lebih dari 2,7 miliar dolar AS atau setara Rp 43 triliun untuk perang melawan kelompok ISIS.

Uang itu telah keluar sejak pemboman AS mulai Agustus 2014. Dari sejumlah itu, terhitung biaya rata-rata dalam sehari, mencapai sembilan juta dolar.

Pentagon dalam laporannya, dilansir CBS, Jumat (12/6), menunjukkan bahwa Angkatan Udara telah menanggung dua pertiga dari total pengeluaran.

Alokasi anggaran Angkatan Udara meliputi biaya tempur harian, pengintaian penerbangan, dan lainnya yang memakan lebih dari 5 juta dolar per hari.

Kongres memperdebatkan anggaran dan melarang pengeluaran pada operasi tempur di kemudian hari. Pelarangan berlaku sampai anggota parlemen mengesahkan resolusi baru.

Biaya operasi militer dilaporkan membengkak sejak serangan udara Mulai di Irak pada Agustus, dan kemudian diperluas ke Suriah pada bulan berikutnya. Alokasi dana militer juga dilaporkan termasuk untuk biaya pelatihan sejumlah anggota militer Irak.

Dikutip dari BBC, besarnya dana tersebut terungkap dalam laporan Pentagon. Laporan menunjukkan dua pertiga dari pengeluaran total dipakai oleh Angkatan Udara.

Laporan itu muncul di saat Kongres menolak pengeluaran lebih lanjut. Parlemen AS menyetujui undang-undang pengeluaran pertahanan sebesar 579 miliar dolar AS. ● wan

## PBB Sebut Pembicaraan Yaman Telah Dijadwalkan

**JENEWA (IM)** - Utusan perdamiaan PBB untuk Taman Ismail Ould Cheikh Ahmed mengumumkan konsultasi inklusif pertama telah dijadwalkan digelar di Jenewa pada Senin waktu setempat atau Selasa (16/6). PBB berharap pembicaraan akan mempertemukan perwakilan dari pemerintah Yaman dan Houthi.

"PBB mengambil kesempatan ini untuk menarik para aktor politik Yaman untuk berpartisipasi dalam konsultasi ini dengan itikad baik dan tanpa pra-kondisi, dan dalam iklim kepercayaan dan saling menghormati," kata Ahmed dalam pernyataan seperti dilansir Aljazeera, Selasa (16/6).

Pemerintah yang diakui internasional, Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi mengatakan delegasinya telah terbang ke Jenewa pada Sabtu (13/6). Tapi perwakilan Houthi dan sekutunya menolak naik dalam pesawat PBB yang akan menghantarkan mereka ke Swiss.

Sementara itu, pembicaraan damai telah memicu harapan di kalangan warga sipil Yaman untuk mencapai resolusi awal konflik. Salah satu warga Saber Nouman mengatakan, ia berharap ada hasil positif dari pertemuan. Ia ingin perang di Yaman segera berakhir. "Kami menginginkan stabilitas dan kami berharap pengepungan segera dicabut, karena kami menderita," katanya.

Juru bicara PBB Ahmad Fawzi mengatakan perwakilan kedua pihak diharapkan tiba di Jenewa pada Ahad. Mereka akan melakukan pembicaraan pendekatan di dua tempat terpisah. Nantinya diharapkan mereka dapat bertemu dalam satu meja.

Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan banyak keluarga telah meninggalkan

daerah yang terpengaruh pertempuran di Ibu Kota Yaman, Sana'a karena rumah mereka hancur dan kekhawatiran mengenai berlanjutan serangan udara.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan di Markas Besar PBB, New York jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal belum dikonfirmasi.

"Selama satu pekan belakangan, dua kapal yang membawa pasokan untuk mendukung operasi kemanusiaan tiba di Pelabuhan Hodaydah, termasuk membawa 7.000 ton meter pasokan makanan dan lebih dari 450 ton meter pasokan bantuan lain," kata Dujarric.

Selain itu, 43 ribu ton meter bahan bakar dikirim melalui kapal komersial ke pelabuhan itu serta Salif.

"Organisasi kemanusiaan melaporkan antrean kapal di Pelabuhan Hodaydah makin panjang akibat penundaan lama karena kurangnya tenaga manusia, bahan bakar dan telekomunikasi yang memadai," kata Dujarric.

Tiongkok sendiri sebelumnya sangat prihatin dengan keadaan yang memburuk di Yaman dan meminta semua pihak menghentikan pertempuran serta menyelesaikan sengketa melalui perundingan.

Hal itu disampaikan Duta Besar Tiongkok untuk Yaman Tian Qi. Beijing berulang kali menyatakan kekhawatiran akan pertempuran di Yaman dan menyerukan penyelesaian politik.

"Tiongkok sangat prihatin dengan pergolakan terus menerus di Yaman dan memburuknya keadaan kemanusiaan," kata Tian Qi dalam konferensi jarak jauh dengan Utusan PBB untuk Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Beijing diharapkan gencatan senjata dicapai secepat mungkin dan semua pihak menjalankan resolusi PBB sekaligus mencari penyelesaian politik. Bahkan, Beijing bersedia melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membantu. ● wan

## AS Ikut Campur Konflik Laut Tiongkok Selatan

**WASHINGTON (IM)** - Amerika Serikat (AS) tidak pernah merespon pembangunan yang dilakukan negara lain di pulau Laut Tiongkok Selatan. Namun baru-baru ini AS menentang keras upaya yang dilakukan Beijing di Laut Tiongkok Selatan.

Menteri Pertahanan Ash Carter mengatakan sejak Perang Dunia II Angkatan Laut AS telah beroperasi terus menerus di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dia menegaskan pihaknya tetap melakukan operasi ini tanpa batas waktu.

Dikutip Reuters, Selasa (16/6) AS berencana untuk menggunakan pesawat dan kapal angkatan laut untuk memperlihatkan bahwa mereka bebas melakukan navigasi Laut Tiongkok Selatan.

Sebelumnya mereka menggunakan Kapal Tempur USS Fort Worth dan pesawat pengintai P-8 Poseidon US Navy saat pembangunan Terumbu Karang Naga.

AS juga kini telah mulai mencari sekutu regional untuk melawan Beijing. Mereka melakukan pengumpulan dan pengawasan intelijen serta memperbarui peralatan militer di negara sekutu.

Filipina telah menerima bantuan militer AS dan pelatihan sejak Perang Dunia II. Namun, peralatan militer tersebut sudah sangat tua untuk menghadapi serangan Beijing. Saat ini AS dan Jepang semakin akrab. Mereka berencana untuk menyediakan senjata militer untuk Filipina dan Vietnam.

Reuters menjabarkan mengenai konflik sebenarnya yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. William Jhonson menguliknya dimulai dari sejarah Laut Tiongkok Selatan. Klaim Beijing terhadap laut tersebut tidak lepas dari sejarah.

Klaim Tiongkok dimulai dari sembilan garis putus-putus yang diperlihatkan oleh Chiang Kai Shek

1947. Selama era RRT, mereka telah memetakan wilayahnya dan memberi nama 291 pulau dan karang yang diakui mereka. Klaim ini bertolak belakang dengan AS.

AS berpendapat bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah internasional. Sehingga kedaulatannya harus ditentukan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

UNCLOS telah menyatakan bahwa negara tidak dapat mengklaim kedaulatan setiap massa tanah yang terendam di air pasang atau sebelumnya tanah tersebut terendam tetapi telah dinaikan diatas permukaan air pasang dengan upaya konstruksi.

PM Jepang Shinzo Abe dan Presiden Filipina Benigno Aquino sebelumnya menyatakan akan mengajukan tindakan unilateral untuk mengubah status quo di Laut Tiongkok Selatan. Abe mengatakan kesepakatan dicapai pada Kamis (4/6) lalu.

"Merujuk pada isu Laut Tiongkok Selatan, kami menegaskan kembali bahwa kami sangat peduli dengan aksi reklamasi skala besar dan kami mengajukan usulan unilateral untuk mengubah status quo," kata Abe dalam konferensi pers pascapertemuan dengan Aquino dilansir Reuters.

Ia tidak menjelaskan lebih lanjut tindakan spesifik apa yang akan dilakukan. Namun mereka memastikan hendak melakukan sesuatu untuk menjaga kondisi wilayah tetap stabil sebagaimana sebelumnya. Pertemuan Abe dan Aquino diselenggarakan pasca meningkatnya aktivitas reklamasi Tiongkok. Mereka membangun pangkalan di pulau buatan yang merupakan area sengketa. Filipina adalah salah satu yang mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari teritorial. ● wan

## Puluhan Ribu Turis Tiongkok Batal Kunjungi Korsel

**SEOUL (IM)** - Akibat virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) yang terus merebak, banyak wisatawan dari Tiongkok yang membatalkan liburannya ke Korea Selatan. Setidaknya, 145 orang di Korea Selatan (Korsel) terinfeksi virus tersebut dan 15 di antaranya meninggal dunia.

Sebuah perusahaan penerbangan Korea Selatan, Selasa (16/6), mengatakan, lebih dari 18 ribu wisatawan Tiongkok membatalkan perjalanan mereka ke Korea Selatan dalam 10 hari terakhir. Tak hanya itu, Shanghai Morning Post melaporkan, sekitar 11 ribu orang dari negara-negara Asia Tenggara dan 7.600 dari Jepang juga membatalkan kunjungan yang mereka rencanakan.

"Musim panas biasanya merupakan musim puncak untuk liburan ke Korea Selatan, tapi tidak tahun ini. Sejuah ini banyak wisatawan membatalkan rencana perjalanan mereka ke negara itu," kata anggota staf agen perjalanan yang berbasis di Beijing, Zhao Nan kepada Times Global, kemarin.

Zhao menambahkan, biasanya dua ratus hingga tiga ratus wisatawan memesan tiket perjalanan liburan ke Korea Selatan melalui lembaganya setiap bulan Juni-Agustus. Tetapi, semua pelanggan telah membatalkan rencana perjalanan mereka sejak awal Juni ketika Mers gencar diberitakan di media. "Dan tidak ada orang yang memesan perjalanan ke Korea Selatan untuk bulan Juli atau Agustus kali ini," kata dia.

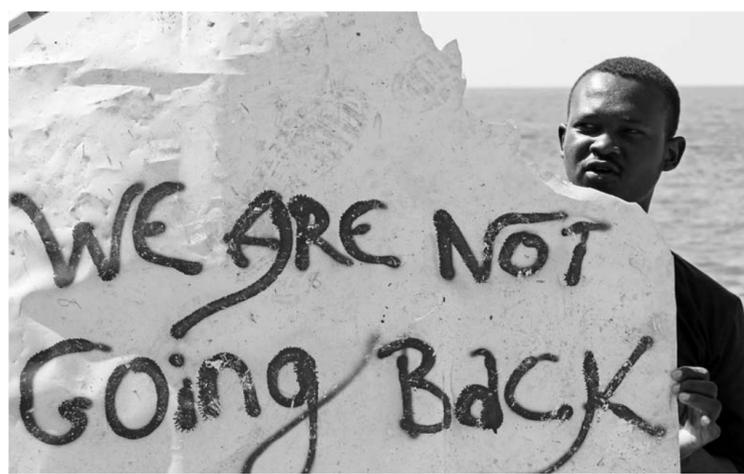
Jumlah penurunan wisatawan juga menyebabkan pengurangan penerbangan. Beberapa maskapai besar Tiongkok, termasuk China Southern Airlines dan China Eastern Airlines telah mengurangi jumlah penerbangan dari Tiongkok ke Korea Selatan.

Departemen Luar Negeri Tion-

gkok menghimbau agar warganya yang berada di Korea Selatan atau berencana pergi ke sana memperhatikan situasi epidemi dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan wabah Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) di Korea Selatan luas dan rumit. Dikutip dari BBC, Sabtu (13/6), WHO mengatakan akan terjadi lebih banyak kasus MERS.

Meski dini untuk mengumumkan wabah telah berakhir, WHO mengatakan tidak menemukan bukti virus MERS menyebar luas di masyarakat. Sekitar 140 orang terinfeksi virus ini sejak wabah merebak bulan lalu. Sebanyak 16 orang lebih telah tewas. Para ahli mengingatkan pemerintah Korea tetap waspada. "Karena wabah luas dan rumit, harus antispasi lebih banyak kasus," kata Keiji Fukuda dari WHO, sekaligus mengingatkan masyarakat dunia. ● wan



IDN/ANTARA/REUTERS

## IMIGRAN DI PERBATASAN SAINT LUDOVIC

Seorang imigran memegang poster di perbatasan Saint Ludovic, Laut Mediterania antara Vintimille, Italia dan Menton, Prancis, Senin (15/6). Polisi Italia dan Prancis menghalangi sekitar 200 imigran dari Eritrea dan Sudan yang berusaha masuk ke negara tersebut.

**ARGO PANTES**  
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMENGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ARGO PANTES, Tbk  
("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT. ARGO PANTES Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu :

Pada Hari, tanggal : Senin / 15 Juni 2015  
Waktu : 10:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Training Perseroan,  
Jalan M.H. Thamrin Km 4, Cikokol - Kota Tangerang

**Mata Acara Rapat :**

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penentuan penggunaan pendapatan untuk tahun buku 2014.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah imbalan serta persyaratan lainnya.
- Pengangkatan Direksi Independen untuk masa jabatan yang baru.

**Jalannya Acara :**

Rapat dihadiri oleh 62.222.600 saham yang memiliki suara yang sah atau 18,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 UJPT, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan suorum kehadiran adalah 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham, oleh karenanya Rapat tidak quorum, dan Rapat memberi mandat kepada Direksi Perseroan untuk melakukan panggilan Rapat kedua.

Jakarta, 17 Juni 2015  
PT ARGO PANTES Tbk  
Direksi